

IMPLEMENTASI PROGRAM

JAKPRENEUR PADA UMKM BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK

JAKPRENEUR PROGRAM IMPLEMENTATION IN MSME DEVELOPED AT THE DEPTMENT OF INDUSTRY, TRADE, COOPERATIVES, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN TANJONG PRIOK DISTRICT.¹

Azkie Himayatu Dini²

Email: azkiahimayatu@gmail.com

ABSTRACT

The development of UMKM is an important thing to do, considering its contribution to GDP and its potential number. Especially the UMKM assisted by the PPKUKM Service in Tanjung Priok District which have more potential numbers than other sub-districts in North Jakarta City. The implementation of the Jakpreneur Program is one of the efforts to develop UMKM and reduce various increases in entrepreneurship opportunities. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of the Jakpreneur Program Implementation at UMKM Assisted by the PPKUKM Service in Tanjung Priok District.

Keywords: *Implementation, Jakpreneur, UMKM, Tanjung Priok District*

ABSTRAK

Pengembangan UMKM menjadi hal yang penting untuk dilakukan, melihat dari kontribusinya terhadap PDB dan potensi jumlahnya. Khususnya UMKM binaan Dinas PPKUKM pada Kecamatan Tanjung Priok yang memiliki potensi jumlah lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Jakarta Utara. Implementasi Program Jakpreneur menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan UMKM dan mengurangi pengangguran melalui peningkatan kesempatan berwirausaha. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui Implementasi Implementasi Program Jakpreneur Pada UMKM Binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok.

Kata Kunci: *Implementasi; Jakpreneur; UMKM; Kecamatan Tanjung Priok*

¹ Diterima 1 Juli 2022, Direvisi 8 Juli 2022

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2020, Indonesia merupakan Negara kedua di ASEAN dengan tingkat pengangguran tertinggi setelah Filipina. Dimana berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka Indonesia meningkat signifikan. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,30%, tahun 2019 sebesar 5,23% dan pada

tahun 2020 mencapai 7,1% (Sumber: BPS Indonesia Tahun 2020).

Dari 34 Provinsi terdapat lima Provinsi yang menempati posisi dengan tingkat pengangguran tertinggi yaitu: Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku dan Provinsi DKI Jakarta. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta sendiri mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya ada tahun 2019 meningkat dari 6,54% menjadi 10,95% di tahun 2020.

Pengangguran disebabkan oleh kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada untuk menyerap para pencari kerja atau angkatan kerja. Pengangguran merupakan masalah yang erat kaitannya dengan perekonomian serta kemiskinan. Karena dengan adanya pengangguran maka produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan (Tappil & Taufik, 2021 : 25).

UMKM dinilai menjadi salah satu sektor yang mampu membatu proses pemulihan ekonomi nasional yaitu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Indonesia sendiri tercatat pernah mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1998, yang mana akibat dari terjadinya krisis tersebut ialah pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat kemiskinan dan pengangguran bertambah. Namun, saat itu ada satu sektor yang memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sektor UMKM.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah persentase rata-rata jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM pada tahun 2018-2020 sebesar 89%. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp. 9,06 triliun yang manadari jumlah tersebut UMKM menyumbang sebesar 61% dari total PDB Indonesia.

Pada tahun 2019 UMKM berkontribusi sebesar Rp. 9,58 triliun atau setara dengan 66,7% total PDB Indonesia, dan pada tahun 2020 menyumbang sebesar Rp. 4,23 triliun atau 37,3% dari PDB Indonesia. Di tahun 2021 UMKM berkontribusi terhadap PDB berdasarkan total investasi sebesar 60,4%.

Jika melihat data diatas, maka tidak berlebihan apabila UMKM memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia dan dapat menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, UMKM juga memiliki perputaran yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan

dengan kebutuhan primer masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.200.000.000,-dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. (Adi Kwartono dalam Aris Ariyanto, 2021: 35). UMKM juga merupakan usaha padat karya, yaitu usaha yang lebih memaksimalkan tenaga manusia sehingga sangat mampu menjadi wadah untuk penciptaan lapangan pekerjaan produktif.

Di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 1,15 Juta unit usaha (Sumber: Media Jaya Edisi 3 Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020) hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,07% atau setara dengan 200,8 ribu orang dari total pengangguran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 yaitu 572,7 ribu orang (Sumber: BPS DKI Jakarta 2021). Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan UMKM Provinsi Banten yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,6 Juta dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 5,6 Juta di Tahun 2020.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Program Jakpreneur dengan tujuan mengembangkan UMKM dan mengurangi pengangguran melalui peningkatan kesempatanberwirausaha. Program Jakpreneur dilaksanakan pada lima wilayah kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta. Salah satunya adalah Kota Jakarta Utara. Di wilayah kota, Jakpreneur dilaksanakan pada setiap Kecamatan.

Kecamatan Tanjung Priok merupakan salah satunya. Yang mana Kecamatan ini memiliki jumlah UMKM terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Jakarta Utara. Pada tahun 2021 jumlah UMKM di Kecamatan Tanjung Priok sebanyak 8.353UMKM.

Program Jakpreneur yang memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran dapat berkurang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah khususnya pada UMKM Binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok.

Kendala dari pelaksanaan ProgramJakpreneur ialah *pertama* masih rendahnya partisipasi binaan jakpreneur dalam mengakses *website* resmi PKT pada halaman <https://www.jakpreneur.jakarta.go.id>. Sehingga, diperlukan upaya ekstra dari para pendamping dalam mengidentifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan secara efektif, efisien dan optimal.

Kedua, sosialisasi yang diberikan oleh instansi kepada peserta atau pelaku UMKM kurang maksimal. Sosialisasi sebelum pendaftaran belum maksimal diberikan dimana sumber informasi pelaku UMKM peserta dalam mengetahui Program Jakpreneur bukan dari instansi pemerintah melainkan dari teman ataupun keluarga. Jika mengacu pada Pergub No. 2 Tahun 2022 pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa pendamping yang disediakan Perangkat Daerah penyelenggara PKT mempunyai tugas salah satunya adalah melakukan sosialisasi program dalam rangka

merekrut peserta PKT (Jakpreneur).

Ketiga, sarana prasarana etalase pada Pojok UMKM di Kecamatan Tanjung Priok yang masih kurang memadai untuk menampung banyaknya produk usaha dari para pelaku UMKM binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok. *Keempat*, SDM yang tersedia yaitu pendamping tingkat Kecamatan Tanjung Priok tidak sebanding dengan jumlah peserta program UMKM binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok. Pendamping mendampingi lebih dari

500 hingga 1.000 UMKM. Jika mengacu pada Pergub No. 2 Tahun 2020 Pasal 19 dijelaskan rasio pelaksanaan pendampingan dengan peserta PKT (Jakpreneur) harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi dan mengedepankan kualitas pendampingan.

Kelima, bimbingan yang diberikan mengenai pelaporan keuangan masih minim dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan para pelaku UMKM peserta program yang masih belum memiliki laporan keuangan per bulan secara rutin. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan penelitian secara lebih mendalam mengenai Implementasi Program Jakpreneur pada UMKM binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok.

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut James Anderson (1994) dalam Solichin Abdul Wahab (2012: 8)

“purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors on dealing with a problem or matter of concern” (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi).

1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Eko Handoyo, 2012: 94) adalah kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output*, sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

2.2 Pengertian Pengembangan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Adi Kwartono dalam Aris Ariyanto (2021: 35) ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal

Rp.200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan.

3. PROGRAM JAKPRENEUR

Program Jakpreneur merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengembangan UMKM, yaitu menciptakan wirausaha baru dan memaksimalkan wirausaha naik kelas melalui 7 langkah PAS di dalamnya.

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERILLE. S. GRINDLE

Penelitian ini menggunakan teori implementasi program Merille.S Grindle yang membagi dua dimensi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of policy*) dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif guna menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek penelitian yang mana dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Jakpreneur Pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Priok dari segi kajian implementasi kebijakan publik.

C. HASIL PENELITIAN

Program Jakpreneur dibuat memiliki tujuan yaitu menumbuhkan potensi kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha sertamengurangi pengangguran melalui peningkatan kesempatan berwirausaha. Program Jakpreneur merupakan branding dari Program Kewirausahaan Terpadu yang mana tujuan serta sasarannya sudah tertuang dalam Pergub No. 2 Tahun 2020 Pasal 2 dan 4.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa kelompok sasaran dalam Program Jakpreneur ada dua, yaitu wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas. Dalam peraturannya pada Pasal 1 disebutkan wirausaha pemula adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ingin berwirausaha dan merintis usaha. Sementara itu wirausaha naik kelas adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang sudah memulai usaha, menjalani usaha atau ingin mengembangkan usaha dalam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan, sasaran dan kepentingan dari kelompok sasaran sudah termuat dalam isi kebijakannya.

Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok dalam pelaksanaannya terdiri dari lima *stakeholders* yang tergabung yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha atau para pelaku UMKM dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Kepala Seksi KUKM Sudin PPKUKM Jakarta Utara menyebutkan dalam prinsipnya *stakeholders* berperan berkolaborasi untuk memfasilitasi.

Namun, mengenai peran dari *stakeholders* tidak dijelaskan dalam Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020.

- IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR PADA UMKM BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK●

dalam pelaksanaan Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok peran dari masing-masing *stakeholders* tidak seperti yang disebutkan oleh pelaksana tingkat atasnamun perannya disesuaikan dengan kemampuan dari para *stakeholders* tersebut.

Pelaksanaan program jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priokmemberikan manfaat kepada para pelaku UMKM binaan Dinas PPKUKM. Manfaat tersebut berupa meluasnya relasi pemasaran, mendapatkan ilmu seputar legalitas usaha dan desain produk, pemberian akses untuk legalitas usaha dan mendapatkan peluang untuk mengikuti bazar *online* maupun *offline* di tingkat Kecamatan, Wilayah Kota hingga Provinsi. Dampak yang dirasakan dengan manfaat-manfaat tersebut ialah omset usaha para pelaku

UMKM peserta program yang meningkat sebanyak 50% dari sebelum bergabung dalam program.

Dalam pelaksanaan Program Jakpreneur di Kecamatan TanjungPriok, perubahan yang ingin dicapai terkait bertambahnya jumlah wirausaha baru dan perkembangan usaha para peserta program yang dilihat dari omset meningkat sudah terpenuhi. Namun, perubahan terkait mengurangi tingkat pengangguranbelum terpenuhi karena pelaku UMKM peserta Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok masih belum menggunakan tenaga kerja dalam kegiatan usahanya. Data Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara, jumlah tenaga kerja dari UMKMpeserta program yang tergabung dalam Jakpreneur pada tahun 2022 hanya sebanyak 32 orang dari 653 jumlah UMKM yang tergabung pada tahun 2022.

Tabel 1

Data Jumlah UMKM dan TenagaKerja dari UMKM Binaan Dinas PPKUKMdi Kota Jakarta Utara Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1.	TanjungPriok	8.572	32
2.	Clinging	8.081	24
3.	Koja	7.182	37
4.	Pademangan	4.961	1
5.	Penjaringan	6.360	62
6.	KelapaGading	3.777	10
Total		38.729	166

Sumber: Suku Dinas PPKUKM JakartaUtara, 2022)

Tujuan dari Program Jakpreneur untuk menciptakan wirausaha realistis untuk dilakukan karena hingga tahun 2022 sudah melampaui target yang ditentukan. Namun tidak semua yang tergabung dalam Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok aktif dalam setiap kegiatannya. Dari 100% UMKM yang tergabung hanya sebesar 44% saja yang aktif mengikuti setiap kegiatan yang ada.

Pelaksana Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok dalam melakukan sosialisasi tidak secara sungguh-sungguh. Hal ini dibuktikan dari sumber informasi mengenai Program Jakpreneur yang tidak didapatkan dari instansi pelaksana melainkan dari teman para pelaku UMKM yang sebelumnya sudah bergabung dalam program. Masih kurangnya peran dari pelaksana dalam memberikan arahan dan sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran melalui *website* kepada para pelaku UMKM peserta programnya.

Belum adanya pengelompokan jenis pelatihan *softskill* dan *hardskill* yang dapat diikuti wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas dalam kegiatan pelatihan pada Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok. Hal tersebut menyebabkan kelompok sasaran wirausaha naik kelas sulit untuk mengikuti pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingannya.

Dalam hal pendampingan berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pendampingan tidak sesuai dengan SOP, yang mana dilakukan melalui *whatsapp* bukan menggunakan sistem *website*

jakpreneur yang sudah tersedia. Selain itu, Kegiatan pelaporan keuangan (P6) pada Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok juga belum dilakukan secara merata ke semua pelaku UMKM binaan Dinas PPKUKM yang tergabung dalam Program Jakpreneur. Pelaporan keuangan tidak dilakukan secara rutin, hanya pada saat diperlukan sebagai persyaratan saja. Jumlah dari peserta yang melaporkan keuangannya dari 2.596 yang aktif hanya 219 peserta saja

Tabel 3.2

Data Jumlah UMKM Binaan Dinas PPKUKM Peserta Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok yang Mengikuti Kegiatan P6

No	Tahun	Jumlah P6
1.	2021	215
2.	2022	4
Total		219

(Sumber: Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Utara, 2022)

Peran dari Sudin PPKUKM Jakarta Utara dalam pelaksanaan Program Jakpreneur adalah membuat jadwal rencana penyelenggaraan kegiatan, mendesiminasi tugas kepada Kasatpel di tingkat Kecamatan, menganggarkan setiap kegiatan dalam pelaksanaan Program Jakpreneur di tingkat wilayah, melakukan evaluasi dan monitoring hasil dari pencapaian UMKM peserta program Jakpreneur di setiap Kecamatan.

Kasatpel sebagai penanggung jawab dan pemimpin dalam proses pelaksanaan Program Jakpreneur di

Kecamatan Tanjung Priok mengatur para pendamping dalam melakukan tugasnya. Pendamping mengarahkan, membina para pelaku UMKM peserta programnya serta terlibat dan bersentuhan secara langsung dengan peserta program mulai dari kegiatan P1-P7. Kapabilitas pendamping dalam segi administrasinya sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, dalam pendampingan masih kurang menguasai atau kurang dalam mengarahkan pelaku UMKM nya dikarenakan latar belakangnya yang bukan dari bidang *entrepreneurship*.

Tabel 3

Pendidikan Pendamping Program Jakpreneur di Kecamatan TanjungPriok

No.	Nama Pendamping	Pendidikan
1.	Ulfa Fauziah Arby	S1-Ekonomi
2.	Irma Yuvita	S1-Ekonomi
3.	Dyah Ayu Luvita Fhauzia	S1-Ekonomi
4.	Hanny Rosalina D. Siregar	S1-Perikanan
5.	Dedi Indrabayu	S1-Pendidikan Matematika
6.	Khaerul Isnan	S1-Sastra Inggris
7.	Abdullah Kamrah	S1-Teknik
8.	Zulkifli	S1-Informatika

(Sumber: Pendamping Kecamatan Tanjung Priok, 2022)

Dalam setiap pelaksanaan program menyesuaikan dengan standar operasional telah ditetapkan. Namun, pelaksana Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok yaitu Kasatpel dan

pendamping dalam melaksanakan program tidak berpedoman pada SOP melainkan disesuaikan dengan langkah-langkah yang biasa diterapkan sehari-harinya dikarenakan pelaksana tingkat kecamatan tidak memegang SOP Program Jakpreneur. Padahal SOP sudah tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas PPKUKM No. 714 Tahun 2021. Hal ini Menunjukkan bahwa Dinas Provinsi dan Sudin PPKUKM Jakarta Utara belum maksimal dalam menyampaikan dokumen SOP yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Program Jakpreneur kepada pelaksana di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian masih kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok. Idealnya satu pendamping mendampingi 60 sampai 80 UMKM peserta program. Namun, pada faktanya pendamping Kecamatan Tanjung Priok mendampingi lebih dari 500 bahkan ada yang mencapai 1.000 UMKM peserta program.

Dalam implementasi kebijakan diperlukan pengambilan keputusan berupa strategi yang dapat digunakan di lapangan untuk memberhasilkan suatu pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian strategi yang digunakan untuk memberhasilkan Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok adalah kegiatan yang sebelumnya *offline*, pada saat pandemi dilakukan secara *online*. Contohnya adalah pelatihan dan

pemasaran agar para pelaku UMKM peserta program tetap bisa mengembangkan, melangsungkan kegiatan berusaha dan mendapatkan penghasilan.

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang digunakan Sudin PPKUKM Jakarta Utara dalam mengatasi konflik yang muncul dengan melakukan pendampingan, pengawasan serta monitoring secara berkala setiap minggu. Selain itu juga melakukan evaluasi hingga menggunakan grup *whatsapp* sebagai media komunikasi antar pelaksana sebagai upaya dalam mengatasi menghindari terjadinya konflik antar lembaga.

Sementara itu, responsifitas dan sikap dari pendamping sebagai pelaksana tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM peserta program dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik. Pada saat bazar para pendamping Kecamatan terjun langsung untuk memonitor para peserta programnya. Pendamping juga Memotivasi peserta program agar terdorong untuk berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil temuan lapangan dan pembahasan mengenai penelitian "Implementasi Program Jakpreneur Pada UMKM Binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok" peneliti mendapatkan kesimpulan akhir bahwa Implementasi Program Jakpreneur Pada UMKM Binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok dalam

pelaksanaannya belum maksimal. Dalam pelaksanaannya, manfaat dan dampak positif dari adanya Program Jakpreneur memang dirasakan oleh UMKM Binaan Dinas PPKUKM. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan.

Perubahan terkait pengurangan pengangguran belum terpenuhi. Jumlah tenaga kerja dari UMKM peserta program yang tergabung dalam Jakpreneur pada tahun 2022 hanya sebanyak 32 orang dari 653 jumlah UMKM yang tergabung pada Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya pendampingan dilakukan melalui *whatsapp* yang mana pendamping menjadi tidak memberikan pendampingan secara detail kepada pelaku UMKM peserta program.

Dalam melaksanakan Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok, para pelaksana seperti Kasatpel dan pendamping tidak berpedoman pada SOP melainkan disesuaikan dengan langkah-langkah yang biasa diterapkan sehari-harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Provinsi dan Sudin PPKUKM Jakarta Utara belum maksimal dalam menyampaikan dokumen Standar Operasional Prosedur yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Program Jakpreneur kepada pelaksana di tingkat Kecamatan.

Kurangnya peran dari pelaksana dalam memberikan sosialisasi mengenai Program Jakpreneur kepada para pelaku UMKM peserta programnya.

- IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR PADA UMKM BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK●

Karena pelaku UMKM peserta program mengetahui program jakpreneur bukan dari instansi pelaksana melainkan dari teman yang sudah lebih dahulu ikut serta dalam program. Program Jakpreneur belum maksimal terlaksana karena sumber daya manusia yang ada masih kurang mencukupi. Jumlah pendamping hanya delapan orang belum mencukupi apabila sedang banyak kegiatan berlangsung. Idealnya satu pendamping mendampingi 60 sampai 80 UMKM peserta program. Namun, pada faktanya pendamping Kecamatan Tanjung Priok mendampingi lebih dari 500 bahkan ada yang mencapai 1.000 UMKM peserta program.

Dalam pelaksanaannya pendampingan dilakukan melalui whatsapp yang mana pendamping menjadi tidak memberikan pendampingan secara detail kepada pelaku UMKM peserta program. Keputusan Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta No. 714 Tahun 2021 disebutkan bahwa proses pendampingan dilakukan melalui website.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan agar Implementasi Program Jakpreneur Pada UMKM Binaan Dinas PPKUKM bisa terlaksana secara lebih maksimal. Memaksimalkan sosialisasi mengenai Program Jakpreneur dan sistem website resmi Jakpreneur yang digunakan sebagai platform dalam melakukan setiap kegiatan.

Mengkaji kembali

penentuan pelaporan keuangan sehingga kegiatan dapat berjalan simultan bukan hanya pada saat tertentu saja. Menambah jumlah pelaksana pendamping kecamatan mengoptimalkan website resmi Jakpreneur sebagai sarana informasi dan platform dalam melakukan setiap kegiatan. Dinas PPKUKM perlu menyebarluaskan Standar Operasional Prosedur kepada pelaksana tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariyanto, Aris. 2021. *Entrepreneurial Mindsets & Skills*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri
- Halil, Abdul & Supriatna, Tjahja. 2020. *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAMASURYA
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Rambe, Tappil & Hidayat, Taufik. 2021. *Sosiologi dari Ruang Kelas*. Medan: Yayasan Kita Menulis

1. PENELITIAN ILMIAH

- Retno, Ike. 2018. *Implementasi Program OKE OCE Bagi Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus OKE OCE Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Qurratun, Muh. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa*. Makassar: UMM

2.DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Profil Industri
Mikro Kecil Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018-2019

Sandingan Data UMKM 2018- 2019
Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Badan Pusat Statistik, Statistik
Indonesia Tahun 2021

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta
Utara dalam Angka Tahun
2021

Badan Pusat Statistik ProvinsiDKI
Jakarta dalam Angka Tahun
2021

3.PRODUK HUKUM

Undang-Undang No. 20 Tahun
2008 Tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 7 Tahun
2021 Tentang Tentang
Kemudahan, Perlindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta
No. 2 Tahun 2020 Tentang
Pengembangan
KewirausahaanTerpadu

Keputusan Kepala Dinas
PPKUKM Provinsi DKI
Jakarta No. 714 Tahun 2021
Tentang Standar Operasional
Prosedur Pengembangan
KewirausahaanTerpadu Pada
Aplikasi Jakpreneur